

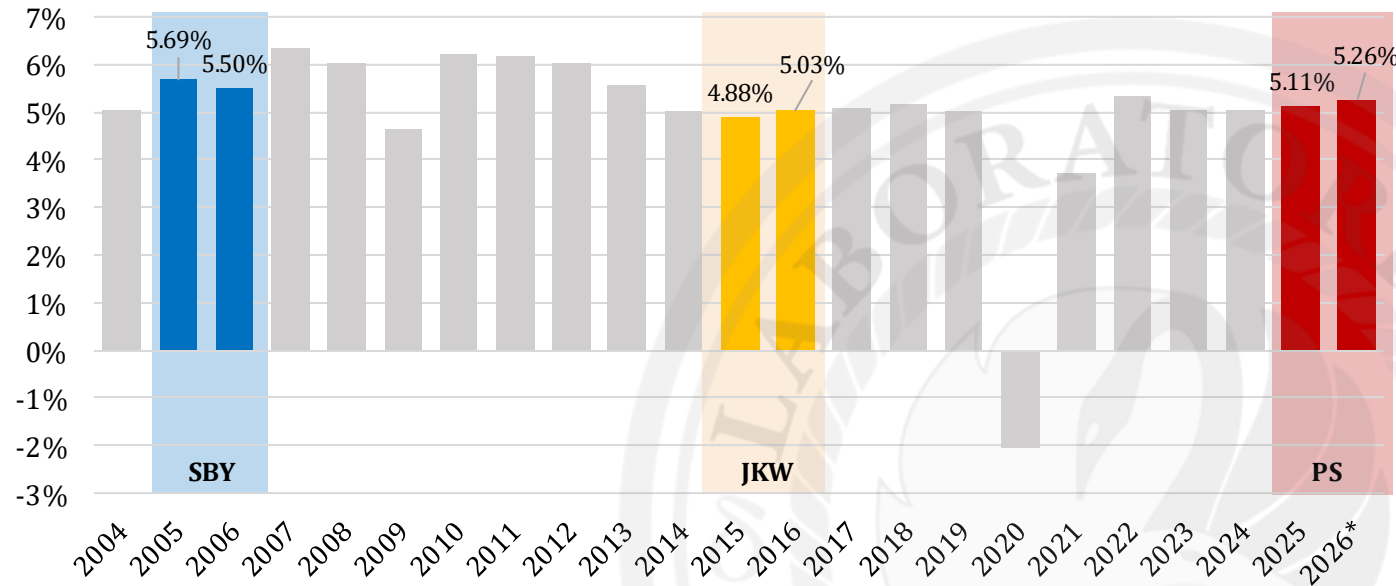


Catatan Dua Tahun Pemerintahan
Prabowo - Gibran Bidang Ekonomi Politik:

**Pusat Makin Gemuk, Daerah
Makin Kurus**

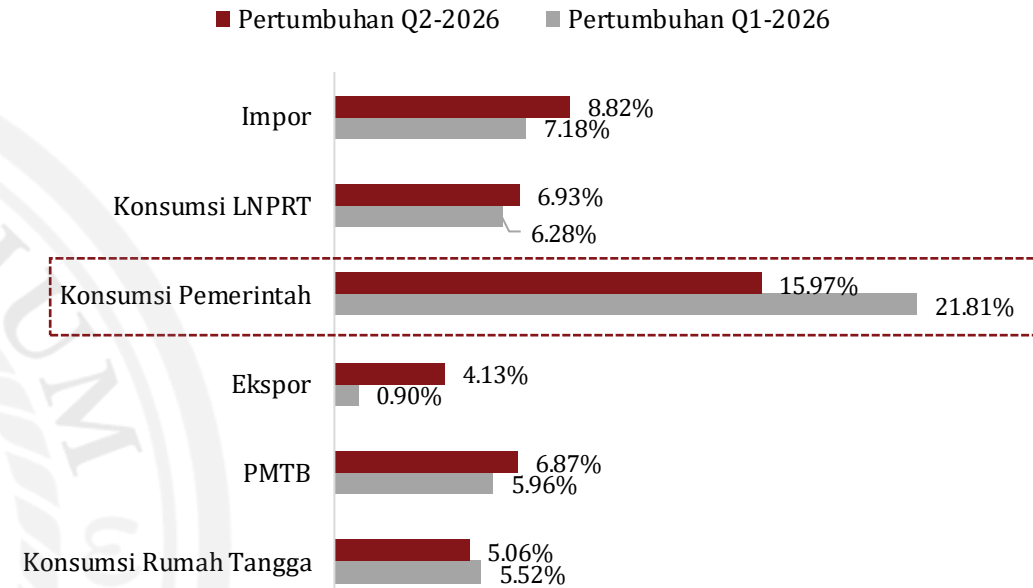
Pertumbuhan Terjaga, Belanja Pemerintah Melonjak

Pertumbuhan PDB (%)



*Pertumbuhan Triwulan II 2026

Pertumbuhan PDB Berdasarkan Pengeluaran



Konsumsi pemerintah tumbuh **21,81%** (Q1) dan **15,97%** (Q2), sementara konsumsi rumah tangga melambat dari 5,52% ke 5,06%.

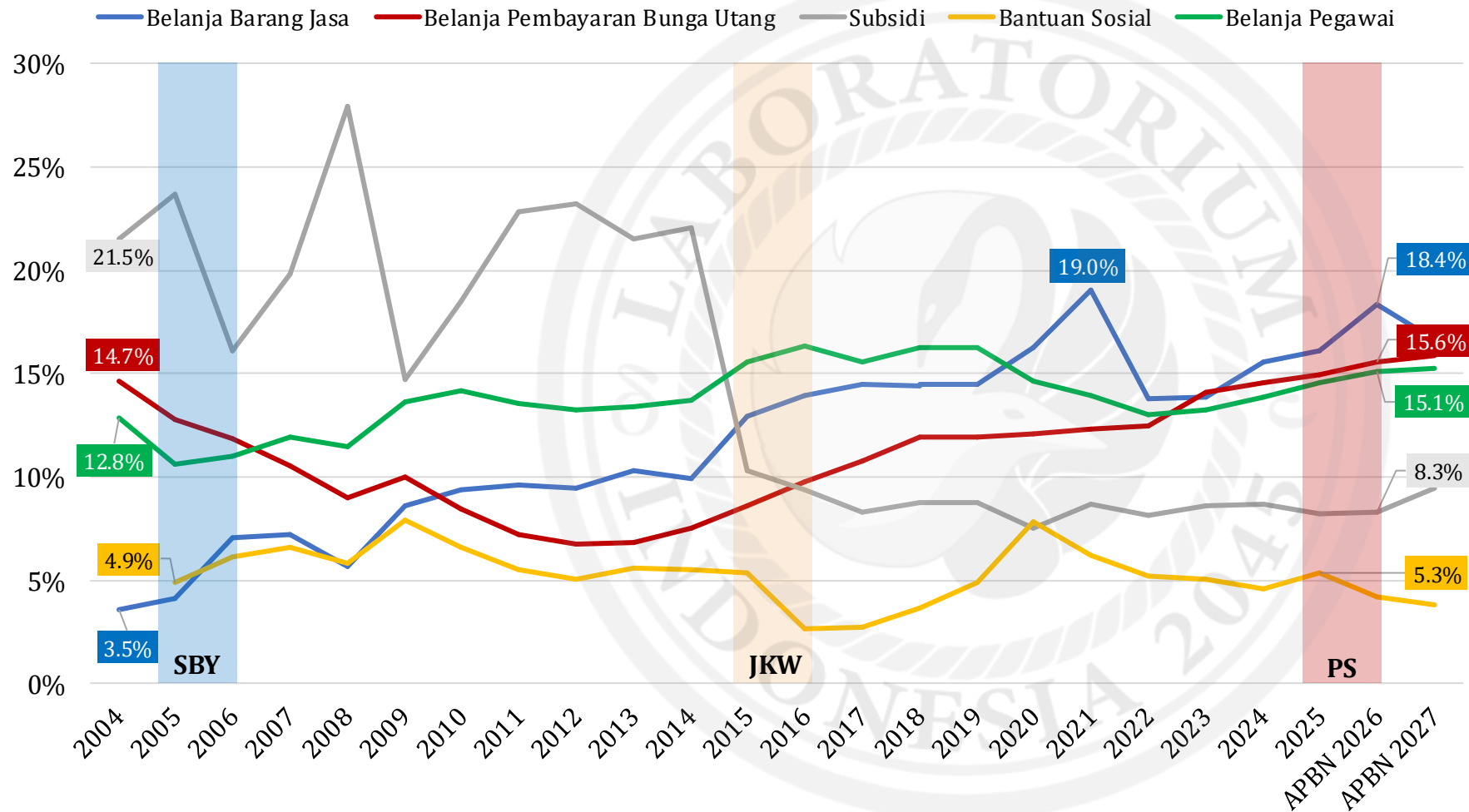
Sumbangan terhadap pertumbuhan PDB TW II 2026 (poin persentase)



Kenaikan belanja pemerintah harus dinilai dari manfaatnya bagi pekerjaan, produktivitas, dan layanan.

Belanja Pusat Membesar, Ruang Fiskal Kian Terikat

Proporsi Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Jenis



18,4%

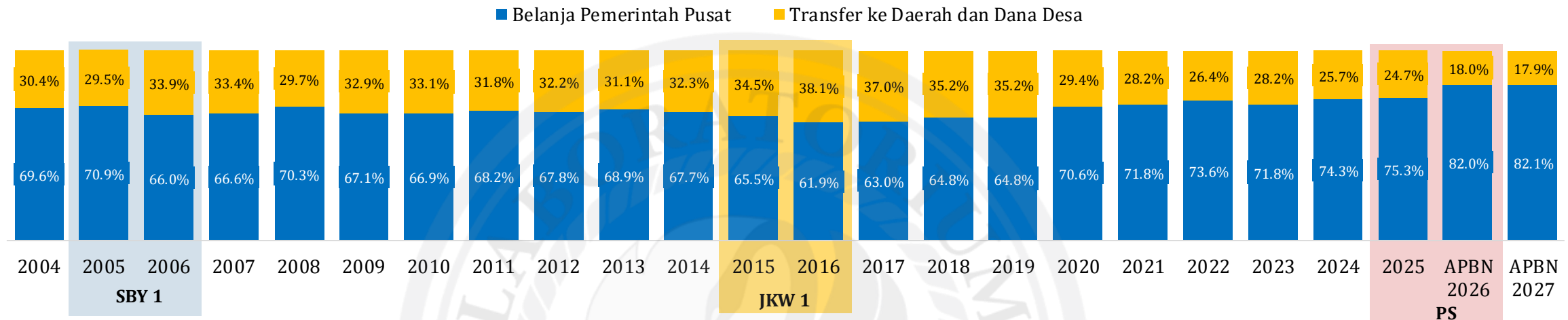
Porsi belanja barang dan jasa terhadap total belanja tahun 2026 menjadi yang tertinggi, di luar periode penanganan Covid-19; BGN adalah penyumbang utama.

15,6%

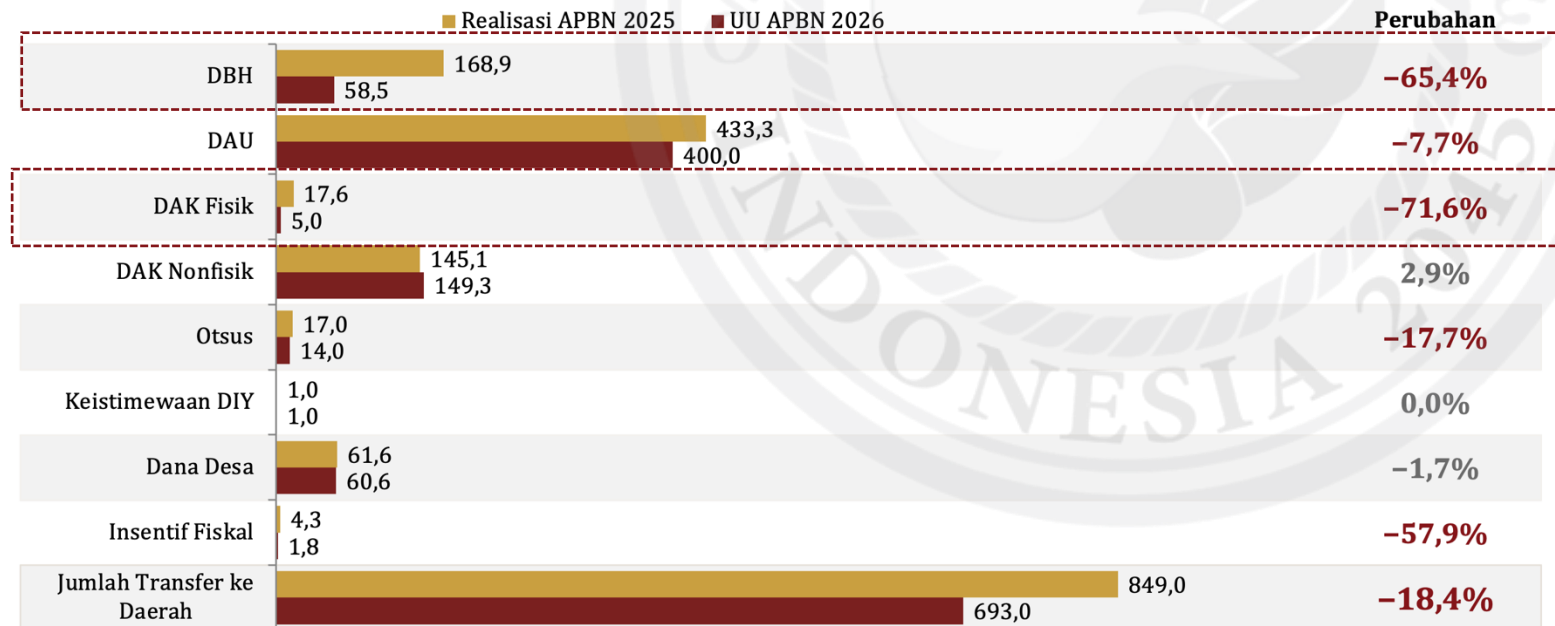
Porsi pembayaran bunga utang mencapai rekor tertinggi kedua dalam APBN 2026. Bunga utang kian bertambah jika belanja negara terus dibiayai oleh utang; yield SBN 10yr mencapai rekor tertinggi 7,3% & porsi terhadap penerimaan negara 19% (melampaui batas aman IMF 9-10%)

Dua Dekade Desentralisasi Fiskal Berbalik Arah

Proporsi Belanja Negara



Komponen Transfer ke Daerah (TKD) Triliun Rupiah



18%

Porsi Transfer ke Daerah (TKD) terhadap belanja negara terendah, di bawah rata-rata 2004-2026 yang mencapai 30,4%. Pola resentralisasi terkuat hadir di rezim Prabowo.

-18,4%

Total TKD: Rp849,0T (realisasi 2025) menjadi Rp693,0T (APBN 2026); **Jika dibandingkan dengan APBN 2025 penurunan TKD mencapai 24,7%.**

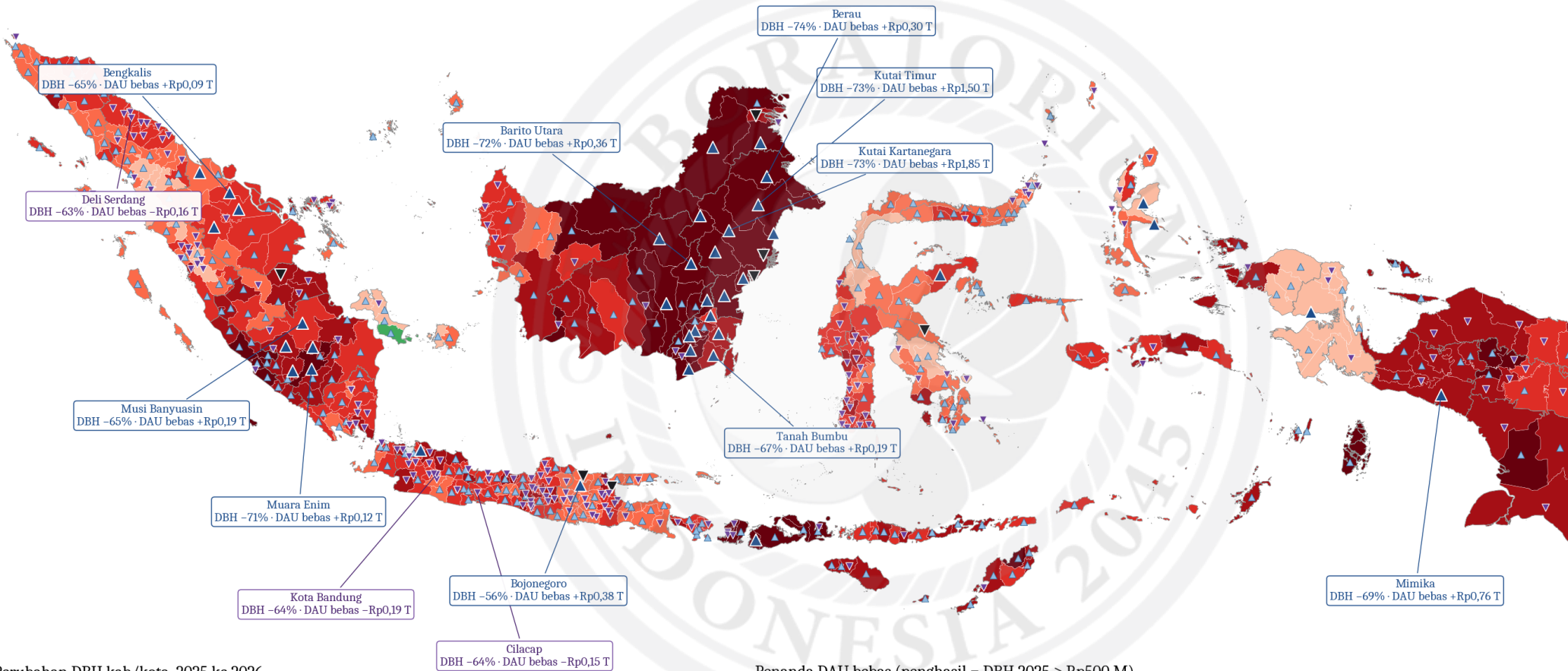
DBH & DAK Fisik

Kehilangan 65,4% dan 71,6%. Padahal **DBH merupakan hak daerah** yang mencakup bagi hasil pajak dan SDA daerah penghasil dan **DAK fisik menyangkut layanan dasar.**

DBH Turun: Hak Daerah Terpangkas, Fungsi Pemerataan DAU Melemah

Perubahan DBH (%) dan arah perubahan DAU bebas, 2025 ke 2026

Warna = persentase perubahan DBH kab/kota. Penghasil (DBH 2025 $\geq$ Rp500 M): segitiga biru (DAU bebas naik) / hitam (turun). Bukan penghasil: biru muda kecil (naik/tetap) / ungu (turun).



$\geq -70\%$

Kehilangan DBH terbesar jatuh kepada daerah penghasil (merah pekat)

Implikasi:

38 dari 45 daerah penghasil menerima kenaikan DAU bebas (segitiga biru). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemangkasan DBH justru menambah tekanan pada DAU sebagai instrumen pemerataan fiskal

Ketika Dana Daerah Menyusut, Masyarakat Menanggung Risiko

DAK Fisik 2025–2026 dalam Triliun Rupiah

Bidang DAK Fisik	APBN 2025	APBN 2026	Perubahan
Pendidikan	14,60	2,38	–83,7%
Kesehatan	11,81	1,87	–84,2%
Konektivitas	2,22	0,37	–83,3%
Air Minum	1,61	0,27	–83,2%
Sanitasi	0,68	0,11	–83,8%
Irigasi	2,48	0,00	–100%
Pangan Pertanian	1,72	0,00	–100%
Pangan Akuatik	1,31	0,00	–100%
Perumahan dan Permukiman	0,26	0,00	–100%
Perdagangan	0,12	0,00	–100%
Industri Kecil dan Menengah	0,05	0,00	–100%
Perlindungan Perempuan dan Anak	0,10	0,00	–100%
TOTAL DAK FISIK	36,95*	5,00	–86,5%

*Angka menunjukkan pagu APBN 2025 bukan realisasi, sehingga nominal yang didapat berbeda dengan analisis sebelumnya

153

Pemerintah Daerah

Tanpa alokasi DAK Fisik sama sekali pada APBN 2026

Pos anggaran yang turut menyusut

DAU yang ditentukan

Pekerjaan Umum + penggajian PPPK

Rp15,68 T + Rp15,34 T (Rp31,04 T) → Rp0

Masalah utamanya: siapa membiayai layanan dan proyek yang tidak lagi mendapat alokasi?

Rekomendasi

KEPADA PEMERINTAH

01

Pulihkan kepastian fiskal daerah

Hitung DBH 2027 sesuai UU HKPD, selesaikan kurang bayar DBH, dan pastikan DAU di jalankan sesuai mandat pemerataan daerah

02

Prioritaskan pemulihan layanan dasar

Kembalikan pembangunan daerah untuk melayani masyarakat; prioritaskan daerah yang kehilangan alokasi pada 2026.

03

Jaga keseimbangan fiskal pusat-daerah

Pastikan pembiayaan program prioritas nasional tidak mengurangi kemampuan daerah menjalankan kewenangan dan layanan publik.

“Pemulihan fiskal daerah diukur dari kemampuan melayani masyarakat, bukan sekadar kenaikan nominal transfer.”



TERIMA KASIH